



Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Implementation of The Financial Regional Management Information System in The Agency regional Tax and Retribution Management Medan City

Desi Mariana Br. Simamora, Beby Masitho Batubara & Agung Suharyanto

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) keuangan merupakan suatu program aplikasi yang ditunjukkan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Fenomena pada penelitian ini yaitu gangguan koneksi jaringan internet pada SIMDA keuangan versi 2.7. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi SIMDA keuangan versi 2.7 dan kendala dalam implementasi SIMDA keuangan versi 2.7 di Sub Bagian Keuangan BPPRD kota Medan. Peneliti menggunakan teori implementasi menurut George C. Edward III yaitu (komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi). Jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu kepala sub bagian keuangan dan staff pegawai PNS dan Non PNS. Data dikumpulkan berdasarkan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan versi 2.7 pada sub bagian keuangan BPPRD kota Medan sudah berjalan dengan baik dan para staff pegawai juga sudah memahami dalam pengoperasian SIMDA tersebut. Namun yang menjadi kendala pada Implementasi ini yaitu gangguan koneksi jaringan internet sehingga mengganggu pekerjaan pada saat melakukan penginputan data.

Kata Kunci: Implementasi; Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan.

Abstract

The Regional Management Information System (SIMDA) finance is an application program that is intended to assist local governments in managing their regional finances. This study aims to determine how the implementation of financial SIMDA version 2.7 and obstacles in implementation financial SIMDA version 2.7 in the Sub-Division of Finance BPPRD Medan city. Researchers used the theory of George C. Edward III regarding implementation, namely (communication, resources, dispositions and bureaucratic structures). This type of research is descriptive qualitative research. The sources of data in this study are the head of sub-section of finance and staff of civil servants and non civil servants. Data were collected based on data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. The informants in the study were the Head of Sub Division of Finance and financial staff. As for the results of the study showed that the implementation of the regional management information system (SIMDA) version 2.7 in the financial sub-section of the Medan City BPPRD has gone well and the staff have also understood the operation of the SIMDA. but the problem with this implementation is the disruption of the internet network connection so that it interferes with work when inputting data.

Keywords: Implementation; Management Information Systems Regional Finance.

How to Cite: Simamora D.M. Batubara, B.M. & Suharyanto, A. (2022). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 4(1), 69-78

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan berhubungan dengan peran pemerintah daerah di dalamnya, karena dukungan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menjadi faktor penting dari berhasilnya suatu pembangunan. Mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan asas desentralisasi, atau yang lebih dikenal dengan nama otonomi daerah.

Otonomi daerah juga memberi kewenangan pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan, melaksanakan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih meningkatkan kinerja dan pengelolaan keuangan daerah agar efektif, efisien, transparan serta akuntabilitas. Hal ini diperlukan dalam rangka agar terwujudnya kualitas laporan keuangan yang baik guna mencapai suatu sistem tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government).

Pada era globalisasi saat ini, instansi pemerintah daerah dituntut agar dapat memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi (TI) dalam meningkatkan kinerja pegawai khususnya dalam hal laporan keuangan. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah diwajibkan menerapkan SAP berbasis akrual paling lambat mulai tahun anggaran 2015. Untuk mendukung peraturan tersebut dibutuhkan suatu sistem yang dapat diandalkan (reliable), sistem yang mampu mengolah data-data (input) dan menghasilkan informasi (output) yang dapat digunakan untuk manajemen dalam pengambilan keputusan. Menurut Davis dalam Rochaety (2017:10) sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem manusia dan mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen dan proses pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengeluarkan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi yang dapat membantu pemerintah daerah menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap, dan dapat di uji kebenarannya, sistem tersebut yaitu sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan. Sistem ini terdiri dari beberapa versi, namun yang berbasis akrual ialah versi 2.7 sebagai penyempurnaan dari versi-versi sebelumnya. Hal ini dikarenakan dinamika perubahan regulasi yang bersifat dinamis dan fleksibel memiliki pengaruh penting terhadap setiap pengembangan aplikasi SIMDA keuangan, agar dapat mengikuti setiap perubahan regulasi dari masing-masing stakeholder.

Menurut data BPKP sampai tanggal 30 juni 2020, Program aplikasi SIMDA keuangan sudah di implementasikan oleh 395 pemerintah daerah. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan khususnya sub bagian keuangan salah satu pemerintah daerah yang sudah mengimplementasikan SIMDA keuangan. Aplikasi SIMDA keuangan bisa digunakan sebagaimana mestinya apabila didukung akses jaringan internet, fenomena yang diamati oleh peneliti pada sub bagian keuangan BPPRD kota Medan salah satu pegawai harian lepas (PHL) dan sebagai operator SIMDA keuangan yaitu Bapak Andy S.E mengatakan SIMDA keuangan sudah di implementasikan pada tahun 2016 menggunakan SIMDA keuangan versi 2.7 hingga saat ini. Adapun yang menjadi masalah pada gangguan koneksi jaringan internet sehingga menyebabkan proses penginputan data menjadi tertunda dan rentan mengakibatkan kesalahan dalam menginput data (wawancara, 18 november 2020).

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian dari Feralien Sembel, Johnny Posumah, dan Very Londa (2019) "Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah suatu studi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud" hasil dari penelitiannya implementasi kebijakan masih belum berjalan dengan baik dan masih terdapat kendala dalam implementasi tersebut seperti kerusakan jaringan sistem aplikasi dan sarana dan prasarana yang kurang memadai serta keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki. Beda hal dengan penelitian yang dilakukan penulis, mengenai Implementasi SIMDA keuangan versi 2.7 sudah berjalan dengan baik, didukungnya sarana dan prasarana serta SDM yang mencukupi untuk menjalankan implementasi tersebut, namun masih seringnya terjadi gangguan koneksi jaringan internet.

Penelitian dari Novlentina Pasi, Abdul Kadir, dan Isnaini (2017) "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Dairi" hasil dari penelien menunjukkan bahwa pelaksana SIMDA keuangan versi 2.7 berbasis akrual sudah terlaksana melalui faktor komunikasi dan disposisi. Adapun permasalahan adalah dari faktor sumber daya dan struktur birokrasi. Pada penelitian yang dilakukan penulis keempat indikator tersebut sudah berjalan dengan baik. (Nasution dkk, 2021; Pratama, 2022).

Penelitian dari Nova Roslina Firdaus (2017) "Kajian Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat" hasil penelitian menunjukkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) merupakan program aplikasi keuangan daerah yang telah mengintegrasikan empat tahapan penyelenggaraan keuangan daerah yaitu (1) Penganggaran, (2) Perubahan anggaran, (3) Penatausahaan, dan (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban. Sedangkan pada penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi SIMDA keuangan versi 2.7.

Berdasarkan persoalan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan research tentang "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan". Maka dari uraian latar belakang permasalahan tersebut tujuan dari riset ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi SIMDA keuangan versi 2.7 pada sub bagian keuangan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, dan untuk mengetahui kendala dalam implementasi SIMDA keuangan versi 2.7 pada sub bagian keuangan BPPRD kota Medan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang memerlukan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh yang berhubungan dengan objek yang diteliti dan mengumpulkan data dan fakta sebanyak-banyaknya. Metode yang digunakan peneliti dapat mendeskripsikan dan menganalisis suatu kejadian atau peristiwa sesuai dengan masalah yang diangkat oleh penulis dengan judul Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) keuangan pada Sub bagian keuangan BPPRD kota Medan.

Penelitian ini dilaksanakan di sub bagian keuangan pada BPPRD Kota Medan yang beralamat di Jl. Jendral Besar H. Abdul Haris Nasution No. 32, Medan, Sumatera Utara. Adapun waktu penelitian yang dilakukan Peneliti selama sebulan yaitu mulai dari bulan Februari 2021 - Maret 2021. Untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam maka dalam penelitian ini ditetapkan informan penelitian. Menurut Afrizal (2016:139) "informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam". Informan penelitian terdiri dari informan kunci, informan utama dan informan tambahan. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu kepala sub bagian keuangan sebagai informan kunci, 3 orang Pegawai Negeri Sipil sebagai informan utama dan 2 orang non Pegawai Negeri Sipil sebagai informan tambahan dalam penelitian. (Pratama dkk, 2019;Lubis dkk,2019).

Peneliti juga menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data guna memperoleh informasi jelas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian yaitu observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi. Observasi menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2015 : 203) merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi yang dilakukan yaitu mengamati kegiatan sub bagian keuangan di kantor BPPRD kota Medan dalam proses administrasi keuangan dengan menggunakan aplikasi SIMDA keuangan versi 2.7 serta ingin mengetahui apa yang menjadi kendala dalam implementasi SIMDA keuangan versi 2.7. Interview (wawancara) Menurut Susan Stainback dalam Sugiyono (2015:318), mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui obsevasi. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan tujuan untuk

mengumpulkan informasi yang kompleks berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi mengenai implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan versi 2.7 dan kendala dalam implementasi tersebut pada BPPRD Kota Medan. Dan dokumentasi Menurut Sugiyono (2015:329) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumentasi yang digunakan peneliti dalam penelitian implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan versi 2.7 seperti foto, gambar serta data-data yang diperlukan peneliti. Analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu analisis data model Miles dan Huberman (2012:255) meliputi : Pengumpulan data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Kesimpulan Data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) keuangan versi 2.7 pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan

Komunikasi

Komunikasi adalah indikator penting untuk melaksanakan suatu implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi George C. Edward III dalam Mulyadi (2016:68). Terdapat tiga hal yang sangat penting pada komunikasi yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Transmisi yaitu penyampaian pesan dengan baik dan mudah dimengerti maka dapat melaksanakan implementasi yang bersifat baik pula. Kejelasan yaitu informasi atau pesan disampaikan secara jelas sehingga dapat diterima dan tidak membingungkan para pelaksana kebijakan. Konsistensi yaitu pesan disampaikan tidak berubah-ubah yang dapat membingungkan pelaksana kebijakan. Komunikasi pada SIMDA keuangan versi 2.7 berkaitan dengan proses sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kepada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menggunakan SIMDA keuangan versi 2.7 termasuk sub bagian keuangan BPPRD kota Medan. Sosialisasi mengenai SIMDA keuangan versi 2.7 pada sub bagian keuangan BPPRD kota Medan juga dilakukan dengan bimbingan langsung kepada para staff pegawai yang baru bergabung, mereka diajarkan bagaimana menginput data laporan keuangan dengan memakai aplikasi SIMDA keuangan versi 2.7 pada saat melakukan pekerjaan oleh para pegawai yang sebelumnya mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan pihak BPKAD dan BPKP. Kebijakan ini diterapkan pada waktu akuntansi berbasis akrual, sesuai dengan peraturan pemerintah daerah maka diwajibkan menggunakan aplikasi tersebut, dengan tujuan mempermudah pekerjaan khususnya pada bidang laporan keuangan pemerintah daerah. karena pada saat data-data di input secara otomatis masuk kedalam akun-akun yang sudah tersedia. (Tarigan dkk, 2021; Nasution dkk, 2021).

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis mengenai implementasi SIMDA keuangan versi 2.7 pada sub bagian keuangan BPPRD kota Medan pada indikator komunikasi yang berkaitan dengan sosialisasi, dapat disimpulkan bahwa transmisi yang berkaitan pada proses sosialisasi sudah efektif dilakukan oleh pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP). Kejelasan informasi dari sosialisasi yang disampaikan juga sangat jelas, hal ini dapat dilihat pada pemahaman para staff pegawai keuangan dalam mengoperasikan aplikasi tersebut. Dan mengenai konsistensi informasi sudah cukup baik, tidak berbelit-belit serta konsisten. Seperti yang disampaikan oleh informan kunci yaitu Ibu Dra. Fitriaty Hasibuan, MM selaku kepala sub bagian keuangan (Kasubbag) BPPRD Kota Medan yang mengatakan bahwa "SIMDA keuangan versi 2.7 di implementasikan pada tahun 2016 dan sebelum diterapkan kebijakan ini tentu dilakukan sosialisasi bagaimana menggunakan aplikasi tersebut. Sosialisasi sudah efektif dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. dan semua jajaran yang ada di sub bagian

keuangan pastinya menggunakan sistem aplikasi SIMDA keuangan versi 2.7 dan terkoneksi langsung ke BPKAD kota Medan.

Sumber Daya

Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. George C. Edward III dalam Mulyadi (2016:68) Kebijakan yang sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya, implementasi tidak akan berjalan efektif sebagaimana yang di inginkan. Pada implementasi SIMDA keuangan versi 2.7 sumber daya berkaitan terhadap sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti fasilitas untuk mendukung implementasi tersebut. Pada sumber daya finansial (pendanaan) bukan pihak BPPRD Kota Medan yang menyediakan ataupun mengelola dana dalam mendukung kebijakan ini, akan tetapi ada pihak lain yang berperan khusus untuk hal itu. Sumber daya manusia (SDM) dari segi kuantitas sudah mencukupi dan didukung dari jumlah pegawai yang tersedia, sedangkan dari segi kualitas para staff pegawai keuangan BPPRD kota Medan mampu dalam mengoperasikan SIMDA keuangan versi 2.7. Sumber daya pendukung lain seperti fasilitas sudah cukup memadai, dilihat dari tersedianya komputer bagi setiap pegawai. seperti yang disampaikan oleh informan utama yaitu ibu Maslina Fitrianty Siregar, S.E sebagai staf pegawai keuangan BPPRD Kota Medan mengatakan bahwa “Para staf pegawai yang ada di sub bagian keuangan BPPRD kota Medan sudah mampu dalam mengoperasikan SIMDA keuangan versi 2.7. untuk jumlah pegawai dan fasilitas juga sudah cukup memadai”. Fasilitas yang tidak memadai maka implementasi tersebut tidak akan berjalan dengan baik, karena ketersediaan komputer bagi setiap pegawai dapat mendukung berjalannya implementasi SIMDA keuangan versi 2.7. (Suryani, A. I., & Suharyanto, A. (2016).

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai sumber daya pada implementasi SIMDA keuangan versi 2.7 di BPPRD Kota Medan dapat dikatakan sangat penting dalam mendukung implementasi kebijakan yang efektif, seperti sumber daya manusia yang mencukupi serta kemampuan para staff pegawai dalam mengoperasikan SIMDA keuangan versi 2.7 di sub bagian keuangan BPPRD kota Medan. Sumber daya lain yang mendukung implementasi SIMDA keuangan versi 2.7 tersebut yaitu meliputi fasilitas dalam implementasi ini seperti jumlah komputer yang memadai, setiap staff pegawai mempunyai komputer masing-masing untuk melakukan proses penginputan data keuangan. Sumber daya juga berkaitan pada sumber daya finansial (dana) pada implementasi SIMDA keuangan versi 2.7. Sumber dana yang dialokasikan dalam penerapan implementasi tersebut adalah dari pihak yang berwenang dalam hal pendanaan, bukan dari BPPRD kota Medan. BPPRD kota Medan khususnya sub bagian keuangan hanya sebagai user (pemakai) aplikasi SIMDA keuangan versi 2.7.

Disposisi

Disposisi berkaitan pada sikap watak dari pelaksana (implementor). Menurut George C. Edward III dalam Mulyadi (2016:68) disposisi merupakan watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. serta disposisi juga berkaitan pada kemampuan yang dimiliki pelaksana kebijakan. Sikap dari para implementor terhadap kebijakan implementasi SIMDA keuangan versi 2.7 sangat setuju, dengan adanya program aplikasi SIMDA keuangan versi 2.7 dapat memudahkan staff keuangan dalam hal menginput data-data keuangan dibandingkan dengan menginput secara manual. Dan tersedia bagian-bagian atau akun- akun untuk mempermudah penginputan data dengan menggunakan aplikasi tersebut, selain itu sikap dari para staff keuangan mengenai implementasi SIMDA keuangan versi 2.7 sangat baik, mereka menerima dan mendukung dengan adanya kebijakan tersebut, karena ini merupakan tuntutan asas transparansi dari pemerintah daerah khususnya dalam hal laporan keuangan. Seperti wawancara penulis dengan salah satu informan utama yaitu bapak Alfa Rheza Daulay, S.E, M.Si selaku staff pegawai keuangan yang mengatakan bahwa “kebijakan implementasi SIMDA keuangan versi 2.7 di awalnya saja rumit akan tetapi ini merupakan tuntutan asas transparansi pemerintah, kita support dan memang kita harus siap belajar

menggunakannya. kita berharap SIMDA ini lebih sederhana karena ini merupakan sistem yang mengatur proses pelaporan keuangan pemerintah daerah”.

Berdasarkan hasil analisis dan observasi yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan bahwa mengenai disposisi pada implementasi SIMDA keuangan versi 2.7 pada BPPRD Kota Medan berkaitan dengan sikap pelaksana kebijakan, adanya dukungan dan sikap baik para staff keuangan BPPRD kota Medan terhadap kebijakan implementasi SIMDA keuangan versi 2.7. Seluruh staff pegawai di sub bagian keuangan baik PNS dan Non PNS setuju dengan kebijakan yang dibuat, karena dengan adanya sistem atau aplikasi SIMDA keuangan membantu para staff pegawai dalam melakukan pekerjaan yaitu menginput data keuangan. Observasi yang dilakukan peneliti tentang kemampuan yang dimiliki staff pegawai PNS dan Non PNS dalam mengoperasikan SIMDA keuangan versi 2.7 bisa dikatakan mampu mengoperasikan aplikasi tersebut. Serta sikap konsisten dari staff pegawai sub bagian keuangan BPPRD kota Medan dalam melaksanakan SIMDA keuangan versi 2.7 secara sungguh-sungguh dan memahami sepenuhnya tujuan dan manfaat dari kebijakan tersebut.

Struktur Birokrasi

Standar Operating Procedures atau (SOP) merupakan salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi. Menurut George C. Edward III dalam Mulyadi (2016:68) struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh dalam implementasi kebijakan. SOP menjadi acuan bagi setiap pelaksana kebijakan (implementor) dalam bertindak. Struktur birokrasi pada implementasi SIMDA keuangan berkaitan terhadap pembagian tugas dalam mengoperasikan SIMDA keuangan versi 2.7. Pada sub bagian keuangan BPPRD kota Medan terdapat pembagian tugas pokok dan tanggung jawab kepada masing-masing bidang, mereka mempunyai tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Pembagian tugas dalam menginput data ke SIMDA keuangan versi 2.7 berbagai macam, ada yang menginput khusus ketetapan pajak parkir, ketetapan pajak restoran, ketetapan pajak air tanah dan lainnya. Hal ini dilakukan agar tidak ada tumpukan pekerjaan. Setiap bulannya akan ada rekonsiliasi data yang nantinya dirangkum menjadi laporan persemesteran atau pertahun. *Standar operating procedures* (SOP) digunakan sebagai acuan untuk langkah-langkah atau tahapan yang akan diambil selama proses kegiatan ataupun program yang akan dilaksanakan. Menurut ibu Dra. Fitriaty Hasibuan M.M selaku kepala sub keuangan (kasubbag) BPPRD kota medan mengatakan bahwa “semua pegawai sudah mengacu SOP yang ada, sesuai dengan bidang mereka masing-masing dan bertanggung jawab dari awal sampai akhir dalam satu anggaran, dan selalu saya monitoring juga evaluasi laporan keuangan agar tidak terjadi penumpukan diakhir tahun”. (Purba, J.F. Tarigan, U. dkk 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis menyimpulkan bahwa struktur birokrasi yang berkaitan dengan standar operasional prosedur (SOP) pada implementasi SIMDA keuangan versi 2.7 di BPPRD kota Medan sudah baik dilakukan. Hal ini dilihat dari para staff pegawai keuangan dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada SOP yang telah ada. dan pembagian tugas-tugas kewajiban dan wewenang sudah dilaksanakan dengan baik. masing-masing pegawai bertanggung jawab dari awal sampai akhir mengenai laporan keuangan dalam satu tahun anggaran.

Kendala dalam implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan versi 2.7 pada sub bagian keuangan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Medan

Berdasarkan hasil analisis dan observasi penulis setelah melakukan penelitian mengenai kendala dalam implementasi SIMDA keuangan versi 2.7 pada BPPRD Kota Medan, hasil yang didapatkan dari informan kunci, informan utama dan informan tambahan saling berkaitan. Tidak hanya masalah gangguan jaringan internet saja, tetapi juga pada servernya. Namun permasalahan server tidak menjadi kendala yang sangat berarti dibandingkan dengan masalah pada gangguan koneksi jaringan internet. Menurut analisis peneliti bahwa SIMDA keuangan versi 2.7 merupakan sebuah sistem atau aplikasi yang dapat beroperasi dengan adanya koneksi jaringan internet. Adapun yang menjadi kendala pada implementasi SIMDA keuangan versi 2.7 yaitu gangguan koneksi jaringan internet, hal ini sering terjadi pada saat melakukan pekerjaan

yaitu menginput data keuangan. Sebelumnya sub bagian keuangan BPPRD kota Medan memakai antenna radio ring untuk koneksi jaringan internet. Dua tahun terakhir sudah memakai fiber optik, dan jaringan internet sudah baik, tetapi adakalanya fiber optik ini lambat, sehingga koneksi jaringan juga menjadi lambat. Jika masalah pada jaringan internet terjadi, pihak sub bagian keuangan BPPRD kota Medan menghubungi Dinas Kominfo selaku penyelenggara jaringan. Penulis mewawancarai informan kunci yaitu ibu Dra. Fitriaty Hasibuan M.M selaku Kepala sub bagian keuangan (Kasubbag) BPPRD kota Medan mengatakan bahwa “seperti yang kami jalani lebih kurang 4 (tahun) kendala yang berarti tidak ada, yang sering kita alami hanya masalah pada gangguan jaringan internet, karena sistem ini dapat beroperasi dengan jaringan internet. ketika jaringan internet bermasalah maka dapat mengganggu pekerjaan pada saat menginput data ke SIMDA keuangan versi 2.7.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penulis setelah melakukan penelitian pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan mengenai implementasi SIMDA keuangan versi 2.7 maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi SIMDA keuangan versi 2.7 di sub bagian keuangan BPPRD kota Medan sudah diterapkan sejak tahun 2016. Komunikasi yang dilakukan sudah sangat efektif, hal ini terlihat jelas dari transmisi, kejelasan dan konsistensi informasi yang disampaikan. Sumber daya yang mencangkup sumber daya manusia, sumber dana dan fasilitas juga sudah memadai. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan implementasi SIMDA keuangan versi 2.7 sudah baik, mereka mampu menjalankan kebijakan tersebut. Dan struktur Birokrasi yang berkaitan pada standar operasional prosedur (SOP) yang ada sudah dilaksanakan dengan baik, hal ini terlihat pada pembagian tugas masing-masing staff pegawai keuangan. Adapun kendala pada implementasi SIMDA keuangan versi 2.7 yaitu masalah pada gangguan jaringan internet, sehingga mengganggu pekerjaan pada saat melakukan pengimputan data. Jika gangguan jaringan internet terjadi pihak sub bagian keuangan BPPRD kota Medan menghubungi Dinas Kominfo selaku penyelenggara jaringan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2016. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Firdaus, N.R. (2016). Kajian Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. *Tesis*, Universitas Pasundan.
- Fuad, B. & FeFri, Indra. (2013). Pendekatan *Technology Acceptance* Model dalam Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah. *Jurnal WRA*. 1(1): 87-110
- Hardjanto, K. Kusuma P, M. & Murjoko. (2019). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Berbasis AkruaL Pada Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang. *Jurnal Teknik Informatika*. 12(1): 11-20
- Hertanto, Y. Domai, T. & Amin, F. (2017). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Terhadap Efektivitas Pelaporan Keuangan (Studi pada Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Di Kabupaten Blitar). *Jurnal Ilmu administrasi Publik*. 2(1): 11-20
- Huberman, M. B. 2012. Analisis Data Kualitatif . Jakarta : UI Press.
- Ikyarti, T. & Aprilia, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*. 9(2): 131-140
- Irfan, H. R. 2014. Sistem Informasi Manajemen. Bandung: Pustaka Setia.
- Lumintang, N. D. (2015). Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kota Manado. *Tesis*. Politeknik Negeri Manado.
- Mulyadi, D. 2016. Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Ole, H.R. (2014). Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi Kasus Pada Dinas PPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara). *Accountability*. 3(2): 1-15
- Pasi, N. Kadir, A & Isnaini. (2017). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan berbasis AkruaL pada Pemerintah Kabupaten Dairi. *Jurnal Administrasi Publik*. 7(1): 49-63
- Rochaety, E. 2017. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: Mitra Wacana Media

Sembel, F. Posumah, J. & Londa, V. (2019). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah suatu studi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*. Universitas Sam Ratulangi. 5(67):37-47

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Perundang-Undangan

Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 tahun 2003 tentang pedoman umum perkantoran Elektronik lingkup internet di lingkungan instansi pemerintah.

Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 tentang pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengembangan SIMDA.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi berbasis Akrua.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Internet

Amar S., Idris., Pratama. I., Anis, A. (2020). Exploring the Link between Income Inequality, Poverty Reduction and Economic Growth: An ASEAN Perspective. *International Journal of Innovation, Creativity and Change Vol*, 11(2), 24-41.

Atrizka, D., & Pratama, I. (2022). The Influence of Organizational Leadership and Coaches on Indonesian Athletes' Adversity Quotient (Intelligence). *Revista de Psicología del Deporte (Journal of Sport Psychology)*, 31(1), 88-97.

Atrizka, D., & Pratama, I. (2022). The Influence of Organizational Leadership and Coaches on Indonesian Athletes' Adversity Quotient (Intelligence). *Revista de Psicología del Deporte (Journal of Sport Psychology)*, 31(1), 88-97.

Atrizka, D., Lubis, H., Simanjuntak, C. W., & Pratama, I. (2020). Ensuring Better Affective Commitment and Organizational Citizenship Behavior through Talent Management and Psychological Contract Fulfillment: An Empirical Study of Indonesia Pharmaceutical Sector. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11(1), 545-553.

Atrizka, D., Pratama, I., Pratama, K., & Suharyanto, A. (2022). Edukasi Masyarakat Lingkungan VIII Titi Kuning Dalam Mendampingi Anak Belajar Daring. *Pelita Masyarakat*, 3(2), 118-124.

Atrizka, D., Pratama, I., Pratama, K., & Suharyanto, A. (2022). Edukasi Masyarakat Lingkungan VIII Titi Kuning Dalam Mendampingi Anak Belajar Daring. *Pelita Masyarakat*, 3(2), 118-124.

Cahyadi, L., Cahyadi, W., Cen, C. C., Candrasa, L., & Pratama, I. (2022). HR practices and Corporate environmental citizenship: Mediating role of organizational ethical climate. *Journal of Positive School Psychology*, 6(3), 17-33.

Candrasa, L., Cen, C. C., Cahyadi, W., Cahyadi, L., Pratama, I., (2020). Green Supply Chain, Green Communication and Firm Performance: Empirical Evidence from Thailand. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11 (12), 398-406. doi:10.31838/srp.2020.12.65

Danilwan, Y., & Dirhamsyah, I. P. (2022). The Impact of The Human Resource Practices on The Organizational Performance: Does Ethical Climate Matter?. *Journal of Positive School Psychology*, 6(3), 1-16.

Danilwan, Y., Dirhamsyah., Pratama, I. (2020). The Impact of Consumer Ethnocentrism, Animosity And Product Judgment On The Willingness To Buy. *Polish Journal of Management Studies 2020*; 22 (2): 65-81.

Danilwan, Y., Isnaini, . D. B. Y. & Pratama, . I. (2020) Psychological Contract Violation: A Bridge between Unethical Behavior and Trust. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11 (7), 54-60.

Danilwan, Y.; Isnaini, D. B.; Pratama, I.; Dirhamsyah, D. 2020. Inducing organizational citizenship behavior through green human resource management bundle: drawing implications for environmentally sustainable performance. A case study, *Journal of Security and Sustainability Issues* 10(Oct): 39-52.

Hakimah, Y., Pratama, I., Fitri, H., Ganatri, M., Sulbahrie, R. A. (2019) Impact of Intrinsic Corporate Governance on Financial Performance of Indonesian SMEs. *International Journal of Innovation, Creativity and Change Vol*, 7(1), 32-51.

<http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/versi-2.1.bpkp>
(diakses pada tanggal 09 Oktober 2020).

https://www.academia.edu/31555041/Modul_Pelatihan_Simda_Keuangan_V_2_7
(diakses pada tanggal 24 Oktober 2020).

Isnaini, D. B. Y., Nurhaida, T., & Pratama, I. (2020). Moderating Effect of Supply Chain Dynamic Capabilities on the Relationship of Sustainable Supply Chain Management Practices and Organizational

- Sustainable Performance: A Study on the Restaurant Industry in Indonesia. *Int. J Sup. Chain. Mgt Vol*, 9(1), 97-105.
- Izar, J., Nasution, M. M., & Ilahi, P. W. (2020). The Stages, Comparisons And Factors Of First Language Acquisition Of Two-Years-Old Male And Female Child. *Jetli: Journal of English Teaching and Linguistics*, 1(2), 63-73.
- Izar, J., Nasution, M. M., & Ratnasari, M. (2020). Assertive Speech Acts in Mata Najwa Program of Episode Gare-Gare Corona. *Lexeme: Journal of Linguistics and Applied Linguistics*, 2(1), 53-58.
- Izar, J., Nasution, M. M., Afria, R., & Harianto, N. (2021). Expressive Speech Act in Comic Bintang Emon's Speech in Social Media about Social Distancing. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 5(1), 148-158.
- Izar, S. L., Nasution, M. M., Izar, J., & Ilahi, P. W. (2021). The The Analysis Of Cooperation Principles Use On Podcast Of Deddy Corbuzier And Nadiem Makarim "Having College Is Not Important. *JETLi: Journal of English Teaching and Linguistics*, 2(1), 23-30.
- Lubis, H., Kumar, D., Pratama, I., Muneer, S. (2015). Role of psychological factors in individuals investment decisions. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 2015, 5, pp. 397-405.
- Lubis, H., Pratama, K., Pratama, I., Pratami, A. (2019). A Systematic Review of Corporate Social Responsibility Disclosure. *International Journal of Innovation, Creativity and Change Vol*, 6(9), 415-428.
- Maggasingang, D., Solong, A., Nadhar, M., Pratama, I. (2020). The Factors Affecting the Corporate Cash Holdings in Listed Firms of Indonesia: Does Corporate Governance Matter?. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Vol 14(5), 1215-1231.
- Marbun, D. S., Effendi, S., Lubis, H. Z., & Pratama, I. (2020). Role of Education Management to Expediate Supply Chain Management: A Case of Indonesian Higher Educational Institutions. *Int. J Sup. Chain. Mgt Vol*, 9(1), 89-96.
- Nasution, J., Dasopang, E. S., Raharjeng, A. R. P., Gurning, K., Dalimunthe, G. I., & Pratama, I. (2021). Medicinal plant in cancer pharmaceutical industry in Indonesia: a systematic review on applications and future perspectives. *perspectives*, 20, 21.
- Nasution, M. M., Izar, J., & Afifah, I. H. (2021). An Analysis of Hate Speech Against K-Pop Idols and Their Fans on Instagram and Twitter from The Perspective of Pragmatics. *JETLi: Journal of English Teaching and Linguistics*, 2(2), 91-99.
- Nugroho, A., Christiananta, B., Wulani, F., Pratama, I. (2020). Exploring the Association Among Just in Time, Total Quality and Supply Chain Management Influence on Firm Performance: Evidence from Indonesia. *Int. J Sup. Chain. Mgt Vol*, 9(2), 920-928.
- Nu'man, A. H., Nurwandi, L., Bachtiar, I., Aspiranti, T., Pratama, I. (2020). Social Networking, and firm performance: Mediating role of comparative advantage and sustainable supply chain. *Int. J Sup. Chain. Mgt Vol*, 9(3), 664-673.
- Pratama, I. (2022). Corporate Governance And Company Attributes On The Financial Reporting Timeline: Evidence Of Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3).
- Pratama, I. (2022). Tata Kelola Perusahaan dan Atribut Perusahaan pada Ketepatan Pelaporan Keuangan: Bukti dari Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4 (3): 1959-1967
- Pratama, I., Che-Adam, N., Kamardin, N. (2019). Corporate social responsibility disclosure (CSRSD) quality in Indonesian public listed companies. *Polish Journal of Management Studies*, 20 (1), 359-371.
- Pratama, I., Che-Adam, N., Kamardin, N., (2020). Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosure Quality in Indonesian Companies. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Vol 13(4), 442-463.
- Pratama, K., Lubis, H., Pratama, I., Samsuddin, S.F., & Pratami, A. (2019). Literature review of corporate social responsibility disclosure. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11(5), 1397-1403.
- Pratami, A., Feriyanto, N., Sriyana, J., & Pratama, I. (2022). Are Shariah Banking Financing patterns pro-cyclical? An Evidence from ASEAN Countries. *Cuadernos de Economía*, 45(127), 82-91.
- Purba, J.F. Tarigan, U. & Nasution, I. & Suharyanto, A. (2019). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. *PERSPEKTIF*, 8 (2): 77-83
- Purba, J.F. Tarigan, U. & Nasution, I. & Suharyanto, A. (2019). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. *PERSPEKTIF*, 8 (2): 77-83.
- Saragih et al., (2020). *Polish Journal of Management Studies* 2020; 21 (2): 384-397
- Saragih, J., Pratama, I., Wardati, J., Silalahi, E. F., & Tarigan, A. (2020). Can Organizational Justice Dimensions Mediate Between Leader Mindfulness and Leader-Member Exchange Quality: An

- Empirical Study in Indonesia Pharmaceutical Firms. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11(2), 545-554.
- Saragih, J., Tarigan, A., Pratama, I., Wardati, J., Silalahi, E. F. (2020). The Impact of Total Quality Management, Supply Chain Management Practices and Operations Capability on Firm Performance. *Polish Journal of Management Studies*, 21 (2), 384-397.
- Saragih, J., Tarigan, A., Silalahi, E. F., Wardati, J., Pratama, I. (2020). Supply chain operational capability and supply chain operational performance: Does the supply chain management and supply chain integration matters. *Int. J Sup. Chain. Mgt Vol*, 9(4), 1222-1229.
- Sibuea, M. B.; Sibuea, S. R.; Pratami, A.; Pratama, I.; Nasution, R. 2020. Is business friendliness enhancing energy consumption in the ASEAN region?, *Journal of Security and Sustainability Issues* 9(M): 409-419.
- Silitonga, K. A. A., Ahmad, . F., Simanjuntak, . C. W. & Atrizka, . D. (2020) Exploring the nexus between the HR practices and work engagement: The mediating role of Job Demand. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11 (7), 342-351. doi:10.31838/srp.2020.7.53
- Sujianto., Yuliani, F., Syofian., Saputra, T, Pratama, I. (2020). The Impact of The Organizational Innovativeness On The Performance Of Indonesian Smes. *Polish Journal of Management Studies* 2020; 22 (1): 513-530.
- Suryani, A. I., & Suharyanto, A. (2016). Implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kesehatan di Rumah Sakit Umum Sibuhuan. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 4(1), 86-99.
- Susilawati, E., Khaira, I., & Pratama, I. (2021). Antecedents to Student Loyalty in Indonesian Higher Education Institutions: The Mediating Role of Technology Innovation. *Educational Sciences: Theory & Practice*, 21(3), 40-56.
- Tambunan, R. W., Muchtar, M., Agustian, P., Salim, A., Aisyah, L., Marpaung, B. A., & Nasution, M. M. (2018). Critical discourse: Applying Norman Fairclough theory in recep Tayyip Erdoğan's balcony speech. *Proceedings of ISELT FBS Universitas Negeri Padang*, 6, 174-183.
- Tanjung, A. A., Ruslan, D., Lubis, I., & Pratama, I. (2022). Stock Market Responses to Covid-19 Pandemic and Monetary Policy in Indonesia: Pre and Post Vaccine. *Cuadernos de Economía*, 45(127), 120-129.
- Tarigan, R. S. (2016). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Elearning*. uma. ac. id.
- Tarigan, R. S. (2017). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Academic Online Campus (AOC)*.
- Tarigan, R. S. (2018). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Program Studi (SIPRODI)*.
- Tarigan, R. S., Azhar, S., & Wibowo, H. T. (2021). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Aplikasi Registrasi Asrama Kampus*.
- Tarigan, R. S., Wasmawi, I., & Wibowo, H. T. (2020). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Tanda Tangan Gaji Online (SITAGO)*.
- Utami, C. W., Indrianto, A. T. L., Pratama, I. (2019). Agricultural Technology Adoption in Indonesia: The Role of the Agriculture Extension Service, the Rural Financing and the Institutional Context of the Lender. *International Journal of Innovation, Creativity and Change Vol*, 7(7), 258-276.
- Utami, C. W., Sumaji, Y. M. P., Susanto, H., Septina, F., & Pratama, I. (2019). Effect of Supply Chain Management Practices on Financial and Economic Sustainable Performance of Indonesian SMEs. *Int. J Sup. Chain. Mgt Vol*, 8(1), 523-535.
- Utami, Sumaji, Susanto, Septina & Pratama, 2019 Utami, Sumaji, Susanto, Septina & Pratama
- Wardhani, I. I. Pratami, A., & Pratama, I., (2021). E-Procurement sebagai Upaya Pencegahan Fraud terhadap Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*. 7 (2): 126-139